



# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

## TAHUN 2025

disusun oleh

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 188.45/ 251 /KUM/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
- c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
- d. Bab IV Penutup.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun. Rencana kerja tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana kerja tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2025

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2025 memuat kebijakan, program dan prioritas kegiatan pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas. Adapun alokasi anggaran indikatif, serta usulan kegiatan, pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Renja dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup disusun secara partisipatif di bawah koordinasi Kepala Dinas dan diharapkan program yang diprioritaskan dapat direalisasikan secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan sesuai kemampuan daerah dalam rangka mendukung visi dan misi jangka menengah daerah Kabupaten Banjar.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1     Latar Belakang.....	1
1.2     Landasan Hukum.....	2
1.3     Maksud dan Tujuan .....	3
1.4     Sistematik Penulisan .....	3
<b>BAB II     EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....</b>	<b>6</b>
2.1     Evaluasi Pelaksanaan Renja – Skpd s.d Triwulan I Tahun 2025.....	6
<b>BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>61</b>
3.1     Program dan Kegiatan .....	61
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Triwulan I tahun 2025 .....	20
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup .....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal 7 UU No. 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026.

Adapun visi Bupati Banjar adalah **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**. Dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar ini mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2022-2026, misi ke 3 yaitu **“Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”**.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2025 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banjar dan Nasional pada umumnya.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Banjar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sosial;
13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan RENSTRA SKPD
15. Permendagri Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Surat Edaran Bupati No. 900.1.1.4/02-03/BPKPAD Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
24. Surat Edaran Bupati No. 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025,
25. Surat Bupati No. 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang Perihal Penetapan Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Review I Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya dan proyeksi capaian tahun berjalan.

3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

##### **BAB II                    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, berisikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi atau melebihi target kinerja. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD serta kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

##### **BAB III                    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR**

Berisikan penjelasan mengenai uraian garisbesar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan antara lain meliputi : perubahan indikator kinerja, jumlah program dan jumlah kegiatan, total kebutuhan dan/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta alasan dilakukan perubahan.

##### **BAB IV                    PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan perkiraan target sampai akhir tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Pasal 3 Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi di Lima (5) bidang yaitu Bidang Penyediaan Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bidang Penyediaan Perumahan terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Penyediaan Perumahan Umum dan Komersil
2. Penyediaan Perumahan Swadaya
3. Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Permukiman
2. Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
3. Keterpaduan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Kajian Dampak Lingkungan
2. Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Pengelolaan Sampah
2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Kemitraan Pengelolaan Sampah

Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 3 seksi yaitu:

1. Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
3. Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

## 2.11 **EVALUASI CAPAIAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN**

### **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

#### **KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA**

##### 1. Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp. 103.741.600,- dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 1.847.000 dan realisasi fisik belum tercapai dikarenakan belum ada SK penetapan bencana dari Bupati terkait status tanggap darurat bencana sebagai dasar pelaksanaan SPM

##### 2. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar 106.385.500,- dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 3.271.500,- dan realisasi fisik belum tercapai dikarenakan belum ada SK penetapan bencana dari Bupati terkait status tanggap darurat bencana sebagai dasar pelaksanaan SPM.

#### **KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA**

##### 1. Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 421.616.700,- dengan target 16 unit Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana belum dapat direalisasikan dan akan di laksanakan di triwulan berikutnya. Faktor penghambat terealisasinya kegiatan ini adalah belum ada SK penetapan bencana dari Bupati terkait status tanggap darurat bencana sebagai dasar pelaksanaan SPM.

#### **KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

##### 1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 122.119.000,- dengan target 50 Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik. Sampai dengan triwulan I capaian realisasi fisik sebanyak 19 dokumen (38%) dan realisasi anggaran sebesar Rp.

13.033.000,- (11%). Tercapainya target sub kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan SOP serta adanya kerjasama yang baik dalam tim. Sedangkan serapan dana yang belum maksimal sesuai anggaran kas bulanannya dikarenakan ada beberapa anggaran yang belum diajukan namun sudah dalam proses pengerjaan.

## 2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 128.703.500,- dengan target 1 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Sampai dengan triwulan I laporan belum dapat terealisasi Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.543.500,- (8%). Tahapan pekerjaan pada triwulan I adalah Inventarisasi data perumahan yang akan dilakukan pemantauan, menyusun metodologi pekerjaan yang akan dilakukan serta menyusun jadwal kerja, dan Verifikasi lapangan terkait pembangunan perumahan Serapan dana yang belum maksimal sesuai anggaran kas bulanannya tersebut dikarenakan ada beberapa anggaran yang belum diajukan namun sudah dalam proses pengerjaan.

### **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

#### **KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### 1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 726.325.600,- dan target 24 unit rumah. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum terrealisasi sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.161.000,-. Faktor penghambat kegiatan ini adalah SK penerima bantuan masih dikoreksi di bagian hukum.

##### 2. Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 183.745.000,- dengan target 100 Jumlah Orang yang Menikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh. Sampai dengan triwulan I 40 orang telah Menikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.238.000,- (7%). Tahapn pekerjaan pada tiwulan ini berupa Melaksanakan kegiatan melaksanakan Sosialisasi di Murung Kenanga.

**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KEGIATAN PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**  
**DENGAN LUAS DI BAWAH (SEPULUH) HA**

1. Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 156.227.000,- dengan target fisik 2 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 3.057.500,- (2%), sedangkan realisasi fisik belum terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga berkas yang sebelumnya disiapkan untuk proses seleksi menjadi berubah dan mengulang.

2. Sub Kegiatan Penyusunan Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP

Pada sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 726.801.000,- dengan target 2 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai, Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 590.000,- (0,1%). Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga menunggu sampai disahkannya dokumen anggaran.

**KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI**  
**BAWAH (SEPULUH) HA**

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 303.000.000,- dan target 6 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum dapat tercapai, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.215.000,- (0,4%). Aktivitas kegiatan telah Melaksanakan koordinasi persiapan awal dengan pihak konsultan, SKPD terkait dan Desa untuk mengikuti pengusuln program DAK TEMATIK.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.482.969.799,- dan target 2 Ha Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar. Sampai dengan triwulan I luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dan realisasi anggaran belum terealisasi. Hal ini dikarenakan cuaca tidak menentu, seringkali hujan menjadi faktor terkendalanya pekerjaan fisik.

## **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

### **KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**

1. Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 11.271.254.000,- dan target 29 Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian. Sampai dengan triwulan I sub kegiatan ini sedang dalam tahap Menyelenggarakan ekspose perencanaan perbaikan PSU dengan pihak konsultan. Sedangkan realisasi keuangan sampai triwulan I sebesar Rp. 8.936.336,- (0,1%). Faktor penghambat kegiatan dikarenakan Lokasi rencana yang dilaksanakan terkendala perbedaan konstruksi yang tercantum di DPA dengan hasil perencanaan sesuai penanganan di lapangan.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan target 1 laporan. Sampai dengan triwulan I target belum terealisasi sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 570.000,- (4%). Faktor penghambat realisasi kinerja dikarenakan belum ada DIPA Satker Perumahan sehingga belum terlaksananya kegiatan.

3. Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 304.505.000,- dan target 20 laporan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tertcapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.311.000,- (0,4%). Faktor penghambat tercapainya realisasi kegiatan dikarenakan kurangnya permohonan serah terima oleh pengembang yang telah selesai melaksanakan pembangunan perumahan.

4. Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 21.648.620.100,- dan target 17 dokumen. Pada triwulan I telah tercapai 1 dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.426.531.524,- (16%). Aktivitas kegiatan adalah melakukan pasang baru PJU/PJL serta perbaikan pju/pjl sesuai laporan yang masuk dari masyarakat dan ada yang Masih dalam Perencanaan tahap konsolidasi (yang masuk kategori konsolidasi).

**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**KEGIATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(RPPLH) KABUPATEN/KOTA**

1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 195.999.700,- dan target 1 Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan I realiasi fisik belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.578.700,- (1%). Faktor penghambat kegiatan ini adalah Ketersediaan Data yang belum optimal dan Menunggu surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pembuatan laporan IKPLH.

**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN/KOTA**

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 203.710.000,- dan target 40 kegiatan Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik telah mencapai 16 kegiatan. Sedangkan untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 9.495.000,- (5%). Faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja adalah Laporan RKL RPL, Database Apatar untuk pelaporan, Surat pengajuan permohonan Pertek Air Limbah.

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 333.161.000,- dan target 2 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum dapat tercapai sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.020.000,- (1%). Aktivitas kegiatan menyiapkan Spectrum di lokasi desa yang mengikuti komunitas untuk iklim (Proklam).

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 122.454.000,- dan target 19 lokasi Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut). Sampai dengan

triwulan I realisasi fisik telah mencapai 18 lokasi. Sedangkan untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 3.876.500,- (3%). Factor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya Raport Hasil IKLH 2024, Rapat Teknis IKLH oleh Pusat, hasil BA bersama DLH Provinsi KalSel.

4. Sub Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 328.311.000,- dan target 1 Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik telah tercapai, sedangkan untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 298.161.000,- (91%). Factor pendorong keberhasilan kegiatan adalah kondisi alat baik dan hasil kalibrasi bagus. Aktivitas kegiatan berupa Maintenance dan kalibrasi rutin untuk alat onlino serta visit I oleh Teknisi Vendor alat.

5. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 409.999.300,- dan target 40 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan. Sampai dengan triwulan I target fisik telah tercapai 10 dokumen sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.751.000 (3%). Tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan berupa pengujian & sampling parameter lingkungan. Faktor yang mendorong keberhasilan capaian kegiatan adalah tersedianya peralatan, bahan kimia, SDM, dan fasilitas pendukung lainnya.

#### **KEGIATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA**

1. Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 200.659.000,- dan target 1 laporan. Sampai dengan triwulan I target fisik 1 laporan belum tercapai sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.710.000,- (1%). Aktivitas kegiatan yang sedang dijalankan berupa menyiapkan bahan untuk sosialisasi lanjutan.

**KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN/KOTA**

1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 85.254.000,- dan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan I target fisik belum dapat terlaksana sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.200.000,- (10%). Tahapan pekerjaan yang telah dilakukan adalah menyiapkan alat untuk kegiatan giat bersih.

**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

**KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA**

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa 1 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 299.994.215,- . Sampai dengan triwulan I 1 Unit kawasan hutan telah dikelola dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.154.000,-. Tahapan pekerjaan yang dilakukan antara lain, - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Kehati, Rapat pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Kehati, Memproses pembelian bahan pestisida untuk pemeliharaan Taman Kehati, Memproses pembelian bahan pupuk organik dan NPK untuk pemeliharaan Taman Kehati, Memproses pembelian bahan obat-obatan insectisida untuk pemeliharaan Taman Kehati, Memproses pembayaran listrik untuk rumah penjaga Taman Kehati dan Gudang, Memproses pembelian Gazebo / Ruang Pertemuan Terbuka, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan Mendokumentasikan kegiatan

2. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)

Sub kegiatan ini memiliki target 15,79 Ha Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota dan memiliki anggaran sebesar Rp. 15.267.789.600,-. Realisasi luas RTH yang dikelola mencapai tercapai 15,79 Ha dengan realisasi anggaran Rp. 1.158.296.908,- (8%). Tahap pekerjaan yang telah dilaksanakan antara lain Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan RTH, Rapat pelaksanaan kegiatan RTH, Memproses pembelian bahan bakar minyak dan pelumas, Memproses pembelian bahan pupuk organik, sekam bakar, dan NPK, Memproses pembelian tanah humus, Memproses pengadaan peralatan sarana/prasarana petugas kebersihan, Memproses pembelian ATK untuk kegiatan RTH, Memproses pembayaran jaminan kesehatan petugas kebersihan, Memproses pembayaran jaminan kecelakaan petugas kebersihan, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan Mendokumentasikan kegiatan

### 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 246.118.000,- dengan target 1 Unit Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik tercapai 100% realisasi anggaran sebesar Rp. 5.798.000,- (2%). Tahap pekerjaan di triwulan I berupa : Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Taman Kehati lainnya, Rapat pelaksanaan kegiatan Taman Kehati lainnya, Melakukan pemeliharaan hutan kota, Melakukan penanaman bersama manis, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan Mendokumentasikan kegiatan. Factor pendorong tercapainya realisasi kegiatan karena adanya usulan/pemintaan penanaman oleh masyarakat.

### 4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja 30 Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman dengan anggaran sebesar Rp. 46.814.000,-. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 300.000,- (1%). Faktor penghambat kegiatan dikarenakan sedang proses pengusulan calon kalpataru.

## **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** **KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3**

### 1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 128.660.000,- dan target 1 dokumen Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.812.000,- (4%). Aktivitas kegiatan berupa Menyiapkan data pelaku usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan pembinaan.

### 2. Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 70.620.000,- dan target 1 Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin

Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.084.000,- (19%). Aktivitas kegiatan berupa Melaksanakan verifikasi lapangan rincian teknis TPS limbah B3 PT. Anugerah Wattiendo, UPTD Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kab. Banjar, UPTD TPA Cahaya

Kencana, PT. Wahana Delta Prima Banjarmasin, PT. Intraco Penta, Tbk., PT. Lintas Garda Mitra Gemilang, dan CV. Hijrah Bukit Bintang.

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**  
**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.944.500,- dan target 15 dokumen Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan. Sampai dengan triwulan I target fisik belum terealisasi dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.158.500,- (1%). Tahapan pekerjaan pada triwulan I antara lain : Uji Administrasi Andal RKL-RPL PT. Gunung Manja Wisata, Uji Administrasi Addendum Andal RKL-RPL PT. Anugerah Watiendo, Uji Administrasi Andal RKL-RPL PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), Uji Administrasi PT. Pulau Baru Makmur, Peninjauan Lapangan PT. Solusi Indo Borneo, Peninjauan Lapangan PT. Gunung Manja Wisata, Peninjauan Lapangan PT. Anugerah Watiendo, Peninjauan Lapangan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

2. Sub Kegiatan Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan target 6 PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik dan anggaran belum tercapai. Factor yang menghambat realisasi kegiatan adalah Jadwal pelatihan yang tersedia tidak banyak, sehingga tidak dapat menyesuaikan jadwal dengan agenda pekerjaan.

3. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan target 6 orang PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik dan anggaran belum dapat di realisasikan dan akan di realisasikan di triwulan berikutnya.

4. Sub Kegiatan Pengawasan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 137.139.000,- dan target 30 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi. Sampai dengan triwulan I Rp. 21.293.000,- (16%). Faktor yang

mendorong realisasi kegiatan adalah Meningkatkan ketaatan pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan. Sedangkan Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam UU No. 32 Tahun 2009 maupun UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanaannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri. Tahapan pekerjaan kegiatan ini berupa Melaksanakan Pengawasan : 1. PT. Pohon Sukses Makmur 2. PT Sincana Putera Abadi

**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**  
**PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**  
**KEGIATAN PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 162.245.400,- dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II kegiatan fisik dan anggaran belum tercapai. Faktor penghambat kegiatan adalah kurangnya sinergitas dalam hal koordinasi dan komunikasi oleh setiap lini baik dari Dinas PRKPLH yang dinaungi oleh Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Dinas/ Lembaga terkait yang berhubungan dengan konsentrasi terhadap pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Jasa Konsultan dan Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.

**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**  
**KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

1. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 281.534.400,- dengan target 1 dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.

8.550.000,- (3%). Factor penghambat tercapainya realisasi kegiatan adalah bila tidak tercapainya kinerja dan upaya mengatasi permasalahan, Tidak semua sekolah dapat dilakukannya pendampingan maupun sosialisasi karena jarak tempuh sekolah yang jauh, kondisi lingkungan yang kurang memadai dan keterbatasan SDM ditiap sekolah, selain itu perlu adanya motivasi yang lebih disetiap sekolah dan warga sekolah untuk terus berpartisipasi pada gerakan peduli dan berbudaya lingkungan sekolah.

**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA**

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 115.419.300,- dengan target 10 pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik tercapai sebanyak 2 dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 8.998.500,- (8%). Faktor penghambat kegiatan berupa Faktor cuaca yg ekstrim serta medan untuk menuju lokasi sangat berat dan sulit.

2. Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 28.240.000,- dengan target 5 sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sampai dengan triwulan I 1 perkara telah dapat ditangani dengan belum adanya realisasi anggaran. Faktor cuaca yg ekstrim serta medan untuk menuju lokasi sangat berat dan sulit menjadi factor penghambat keberhasilan kinerja.

3. Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 8.935.000,- dengan target 5 penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik dan anggaran belum dapat tercapai. Faktor penghambat kegiatan berupa faktor cuaca dan lambatnya proses pengumpulan data dari pengadu.

## **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

### **KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH**

1. Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan target 1 dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik dan anggaran belum dapat tercapai. Hal ini dikarenakan masih dalam proses Menyelesaikan dokumen kepuasan masyarakat, Merancang perubahan UU perda dan Merancang perubahan Jakstrada

2. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota  
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 18.328.453.036,- dan target 65700 ton Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan I 14523 ton Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.062.295.208,- (17%). Aktivitas kegiatan berupa Pemeliharaan berkala untuk armada pengangkut sampah dan Evaluasi kinerja petugas dilapangan.

3. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 836.000.000,- dan memiliki target 4 kelompok Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Sampai dengan triwulan I kegiatan fisik telah tercapai 1 kelompok masyarakat dengan realisasi anggaran Rp. 62.370.000,- (7%). Faktor pendorong kegiatan dikarenakan Besarnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dengan mengikuti sosialisasi. Pada triwulan I tahapan pekerjaan yang dilakukan antara lain, Melaksanakan sosialisasi perda pengelolaan sampah di desa Sumber Baru, Kec. Sungai Pinang  
Melaksanakan sosialisasi perda pengelolaan sampah di Kec. Gambut  
Melaksanakan pembentukan KSM dan Bank sampah di kelurahan Gambut, Kec. Gambut serta Melaksanakan pembentukan KSM dan Bank sampah di kelurahan Murung , Kec. Gambut

4. Sub Kegiatan Penyediaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 6.204.694.900,- dan target 15 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,

Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 724.614.693,- (12%). Faktor penghambat kegiatan adalah Pada pek. revitalisasi TPA masih belum optimal sesuai TS dikarenakan faktor cuaca.

## **UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH BLUD INTAN HIJAU**

### **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

#### **KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH**

##### 1. Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dan target 1 dokumen Kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik dan anggaran belum tercapai. Kegiatan berupa Penanganan sampah di perusahaan-perusahaan yang berkerjasama dengan BLUD Intan Hijau.

2. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.973.246.500,- dan target 65700 ton Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan I 27375 ton Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 756.443.975,- (19%). Faktor penghambat kegiatan adalah Kondisi alat berat sering mengalami kerusakan sehingga menghambat waktu penanganan/penataan sampah.

##### 4. Sub Kegiatan Penyediaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.213.190.000,- dan target 7 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik telah tercapai 1 unit sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 199.661.000,- (16%). Faktor penghambat kegiatan adalah Kondisi cuaca yang sering berubah-ubah.

Berdasarkan uraian evaluasi capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan diatas belum menimbulkan implikasi terhadap target capaian program Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Hal itu dikarenakan hasil evaluasi renja yang dihasilkan hanya sampai dengan triwulan I dimana kegiatan-kegiatan masih dalam proses pengerjaan hingga triwulan IV. Sedangkan

untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhi, telah memenuhi atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah menyesuaikan dengan rencana aksi yang dibuat oleh bidang pengampu program kegiatan.

Tabel 2.1.

## Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Triwulan I tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKe g	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keua ngan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>														
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Persentase Terselenggar anya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	21.948.60 0.626	4.186.198. 757	25%	19%	25%	125%	125%
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	21.948.60 0.626	4.186.198. 757	25%	19%	25%	125%	125%
			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	100%	94.999.20 0	6.612.000	25%	7%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	27	2	5.000.000	0	0	0%	0%	27	245%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	4	1	5.000.000	0	0	0%	0%	4	80%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	4	1	5.000.000	0	0	0%	0%	4	80%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	4	1	5.000.000	2.166.000	1	43%	100%	5	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
				Dokumen DPA-SKPD										
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	5.000.000	0	0	0%	0%	1	20%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	10	3	5.000.000	0	3	0%	100%	13	87%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	64	16	34.999.900	0	4	0%	25%	68	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1	10.000.000	0	0	0%	0%		
			Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			20	9.999.800	0	0	0%			
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	9.999.500	4.446.000	1	44%			

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	100%	15.957.119.000	2.584.660.886	25%	16%	25%	125%	125%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	88	93	15.379.100.000	2.577.450.886	93	17%	100%	181	195%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	13	13					0%	13	100%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD			12	552.440.000	0	3				

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	7.230.000	7.210.000	1	100%	100%	2	200%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	16	2	8.366.200	0	0	0%	0%	16	100%
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13	13	2	9.982.800	0	0	0%	0%	13	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya DOKumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu			100%	3.499.700	3.499.700	25%		25%	25%	25%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			8	3.499.700	3.499.700	0		25%	0	0%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	100%	100%	100%	149.999.600	0	25%	0%	25%	125%	125%
			Pendataan dan Pegolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5	20.000.000	0	0			0	0%
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			40	29.999.600	0	0			0	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18	12	10	100.000.000	0	0	0%	0%	12	67%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.137.867.300	664.519.062	25%	58%	25%	125%	125%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	10	1	31.993.500	0	0	0%	0%	1	3%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	9	1					0%	1	5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	7	1	6.993.500	135.000	0	2%	0%	1	25%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	19	1	20.392.500	123.000	0	1%	0%	1	25%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	8	1	9.000.000	0	0	0%	0%	1	5%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	4	2	17.994.000	700.000	0	4%	0%	2	13%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	10	5	6.494.000	3.247.000	0	50%	0%	5	13%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	1070	500	1.044.999.800	163.703.933	0	16%	0%	1070	238%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	827.968.000	90.799.946	25%	11%	25%	125%	125%
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			103	375.140.000	90.799.946	1	0%	1%	1	1%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			87	452.828.000	0	0	0%	0%	0	0%
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1			0		0%	1	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100%	100%	100%	3.039.418.526	754.296.804	25%	25%	25%	125%	125%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	36	12	2.190.000	0	3	0%	25%	39	65%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	18	12	309.998.526	40.030.704	3	13%	25%	21	175%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	24	12	2.727.230.000	714.266.100	3	26%	25%	27	180%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	100%	741.229.000	85.310.059	25%	12%	25%	125%	125%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	42.750.000	11.006.459	1	26%	100%	2	200%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	33	34	536.560.000	70.424.675	0	13%	0%	33	122%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	90	80	66.920.000	3.878.925	0	6%	0%	90	129%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	94.999.000	0	0	0%	0%	1	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	Meningkatnya Perumahan yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni			97,45%	98.43%	97.38%	1.792.636.900	50.094.000	0	3%	0%	0%	0%
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Yang Terkena Bencana Maupun Terkena Relokasi Program Kabupaten	100%	100%	100%	882.566.300	28.695.000	25%	3%	25%	125%	125%
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang terdata akibat korban bencana	100%	100%	100%	210.127.100	5.118.500	25%	0%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	3	1	1	103.741.600	1.847.000	0	2%	0%	0	0%
			SubKegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5	2	1	106.385.500	3.271.500	0	3%	0%	0	0%
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100%	100%	100%	421.616.700	0	25%	0%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	49	49	16	421.616.700	0	0	0%	0%	49	100%
			Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang	100%	100%	100%	250.822.500	23.576.500	25%	9%	25%	125%	125%
			SubKegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	250	259	50	122.119.000	13.033.000	19	11%	38%	278	111%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	6	4	1	128.703.500	10.543.500	0	8%	0%	4	67%
			<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>22,89%</b>	<b>22.78%</b>	<b>22.83%</b>	<b>910.070.600</b>	<b>21.399.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2%</b>	<b>25%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100%	100%	100	910.070.600	21.399.000	25	2%	25%	125%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	74	92	24	726.325.600	8.161.000	0	1%	0%	92	124%
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			100	183.745.000	13.238.000	40	7%			
		<b>Persentase PSU yang memadai</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>33.239.379.100</b>	<b>3.437.348.860</b>	<b>25%</b>	<b>10%</b>	<b>25%</b>	<b>125%</b>	<b>125%</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	21,71%	24,00%	25%	33.239.379.100	3.437.348.860	0	10%	0%	0%	0%
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	100%	100%	100%	33.239.379.100	3.437.348.860	25%	10%	25%	125%	125%
			SubKegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	34	62	29	11.271.254.000	8.936.336	0	0,1%	0%	62	182%
			SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5	3	1	15.000.000	570.000	0	4%	0%	3	60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	120	60	20	304.505.000	1.311.000	0	0,4%	0%	60	50%
			Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	110	45	17	21.648.620.100	3.426.531.524	1	16%	6%	46	42%
2	Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase Kawasan Kumuh			89,20%	84,74%	82,76%	4.668.997.799	4.862.500	0	0%	25%	84,74%	95%
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	30,23%	20,23%	25,23	4.668.997.799	4.862.500	0	0%	25%	20,23%	67%
			Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganan	23	13	5	883.028.000	3.647.500	0	0%	0%	13	57%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	9	6	2	156.227.000	3.057.500	0	2%	0%	6	67%
			Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	5	4	2	726.801.000	590.000	0	0,1%	0%	4	80%
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	37,2	33,38	2,4	3.785.969.799	1.215.000	0	0%	25%	33,38	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	25	12	6	303.000.000	1.215.000	0	0,4%	0%	12	48%
			SubKegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	10	6,41	2	3.482.969.799	0	0	0%	0%	6,41	64%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)			50,6	64,15	50.5	1.683.548.300	378.863.500	0	23%	0%	64,15	127%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)			77,23	94,62	77.1			0		0%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			58,78	55,5	56.78			0		0%	55,5	94%
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Tingkat Pencemaran Air	5,1	0,74	5,1	1.683.548.300	378.863.500	0	23%	0%	0,74	15%
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	50,6	64,15	50.5	1.397.635.300	325.303.500	0	23%	0%	64,15	127%
				Indeks Kualitas Udara	77,23	94,62	77.1			0		0%	94,62	123%
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	175	102	40	203.710.000	9.495.000	16	5%	40%	118	67%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5	3	2	333.161.000	2.020.000	0	1%	0%	3	60%
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		23	19	122.454.000	3.876.500	18	3%	95%	41	41%
			Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan		1	1	328.311.000	298.161.000	1	91%	100%	2	2%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	175	85	40	409.999.300	11.751.000	10	3%	25%	95	54%
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya	100%	100%	100%	200.659.000	38.175.000	25%	19%	25%	125%	125%
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12	4	1	200.659.000	38.175.000	0	19%	0%	4	33%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	100%	100%	100%	85.254.000	15.385.000	25%	18%	25%	125%	125%
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	1	1	85.254.000	15.385.000	0	18%	0%	1	100%
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>15.860.715.815</b>	<b>1.210.548.908</b>	<b>25%</b>	<b>8%</b>	<b>25%</b>	<b>125%</b>	<b>125%</b>
			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Keaneekaragaman Hayati Yang Ditangani	100%	100%	100%	15.860.715.815	1.210.548.908	25%	8%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,7	3,7	1	299.994.215	46.154.000	1	15%	100%	3,7	100%
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15,79	15,79	15,79	15.267.789.600	1.158.296.908	15.79	8%	100%	15,79	100%
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4,5	2,5	1	246.118.000	5.798.000	1	2%	100%	2,5	100%
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50	30	30	46.814.000	300.000	0	1%	0%	30	60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKe g	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia</b>	100%	100%	100%	195.999.700	2.578.700	25%	1%	25%	125%	125%
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	195.999.700	2.578.700	25%	1%	25%	125%	125%
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	5	3	1	195.999.700	2.578.700	0	1%	0%	3	60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
4	Meningkatnya Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Petaan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH			100%	100%	100%	1.100.435.100	107.156.500	25%	10%	25%	125%	125%
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	503.083.500	12.250.500	25%	2%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	503.083.500	23.451.500	25%	5%	25%	125%	100%
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	75	72	15	150.944.500	2.158.500	0	1%	0%	72	96%
			Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD		2	6	150.000.000	0	0	0%	0%	2	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4	5	6	65.000.000	0	0	0%	0%	5	125%
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150	90	30	137.139.000	21.293.000	0	16%	0%	90	60%
			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>153.571.800</b>	<b>26.363.000</b>	<b>25%</b>	<b>17%</b>	<b>25%</b>	<b>125%</b>	<b>125%</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa  Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	153.571.800	26.363.000	25%	17%	25%	125%	156%
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50	23	10	115.419.300	18.233.000	0	16%	0%	23	46%
			Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		5	5	28.982.700	6.615.000	0	23%	0%	5	5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		5	5	9.169.800	1.515.000	0	17%	0%	5	5%
			<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>162.245.400</b>	<b>5.374.000</b>	<b>25%</b>	<b>3%</b>	<b>25,0%</b>	<b>125%</b>	<b>125%</b>
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	100%	75%	75%	162.245.400	5.374.000	25%	3%	25,0%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5	3	1	162.245.400	5.374.000	0	3%	0%	3	60%
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK</b>	<b>Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan</b>	45%	35%	100%	281.534.400	63.169.000	25%	22%	0%	60%	133%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	90%	65%	75%	281.534.400	63.169.000	0%	22%	0%	65%	72%
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5	3	1	281.534.400	63.169.000	0	22%	0%	3	60%
5	Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani			70%	72,65%	71%	31.405.584.436	9.917.737.998	0%	32%	36%	0	0%
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b>	<b>30%</b>	<b>26,55%</b>	<b>24,40%</b>	<b>25.469.147.936</b>	<b>7.269.011.647</b>	<b>6,36%</b>	<b>29%</b>	<b>26,07%</b>	<b>26,55%</b>	<b>88,50%</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	24,50%	26,55%	24,40%	25.469.147.936	7.218.802.647	6,36%	28%	26,07%	26,55%	108%
				Persentase Sampah Yang Ditangani	62,00%	73,45%	61,75%			11,59%		18,77%	73,45%	118%
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65.700	65700	65.700	18.328.453.036	7.323.471.101	14.523	40%	22%	119269	182%
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		1	1	100.000.000	0	0	0%	0%	1	1%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	20	20	15	6.204.694.900	516.390.330	0	8%	0%	20	100%
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	64	20	4	836.000.000	342.962.000	1	41%	25%	21	33%
			UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah BLUD Intan Hijau											
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah</b>	<b>30%</b>	<b>26,55%</b>	<b>24.40%</b>	<b>5.936.436.500</b>	<b>2.648.726.351</b>		<b>45%</b>		<b>26,55%</b>	<b>88,50%</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
				<b>Tangga</b>										
			Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	24,50%	26,55%	24.40	5.936.436.500	2.648.726.351		45%		26,55%	108%
				Persentase Sampah Yang Ditangani	62,00%	73,45%	61.75							73,45%
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	27	15	7	1.213.190.000	219.600.000	0	18%	0%	15	56%
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	131400	72900	65700	3.973.246.500	1.921.090.148	0	48%	0%	72900	55%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	3	1	1	750.000.000	508.036.203	0	68%	0%	1	33%
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>199.280.000</b>	<b>31.314.950</b>	<b>25%</b>	<b>16%</b>	<b>25%</b>	<b>125%</b>	<b>125%</b>
			Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	58%	60%	62%	199.280.000	31.314.950	0%	16%	0%	60%	103%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	3	1	128.660.000	14.303.000	0	11%	0%	3	60%
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5	3	1	70.620.000	17.011.950	0	24%	0%	3	60%

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2022-2026, misi ke 3 yaitu **“Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”**, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2025 terdiri dari :

Program utama yang dilaksanakan tahun 2025 meliputi :

#### **1. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini terdiri dari 3 kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan, mengkoordinasikan pengawasan dan monitoring dari kegiatan penyediaan perumahan baik perumahan umum maupun perumahan swadaya. Pada program ini diarahkan untuk melakukan koordinasi lintas SKPD yang berkaitan dengan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu juga menyusun dan mensosialisasikan beberapa kebijakan dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman kepada stakeholder dan masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur hunian yang layak bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan memfasilitasi penyediaan perumahan untuk menempati rumah layak huni serta meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, peningkatan kualitas dan pembangunan. Serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan terhadap usulan peningkatan kualitas perumahan pada masyarakat, memfasilitasi proses permohonan persetujuan dokumen teknis terkait penyusunan siteplan untuk mendukung proses perizinan pembangunan perumahan yang cepat, efektif dan efisien.

#### **2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota berupa perbaikan rumah tidak layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.

**3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini mengampu 1 kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan meliputi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan dan melaksanakan verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang serta melakukan kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU perumahan.

**4. Program Kawasan Permukiman**

Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan melakukan survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman yang kumuh, menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan kumuh serta penyadaran publik terkait dengan pencegahan tumbuh dan berkembagnya permukiman kumuh. kegiatan lain yang dilakukan terkait peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.

**5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini memiliki 3 kegiatan untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut. Selain itu juga melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan laboratorium lingkungan hidup. Kegiatan lain untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan memberikan informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan pada masyarakat serta pemulihan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi.

**6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan pengelolaan taman diluar kawasan hutan, pengelolaan ruang terbuka hijau dan taman lainnya serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

**7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten dan menyelenggarakan kajian lingkungan hidup strategis meliputi pembuatan.

**8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Program ini mengampu 1 kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan mendampingi gerakan peduli lingkungan hidup.

**9. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH**

Program ini memiliki 1 kegiatan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak mha yang terkait dengan PPLH dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.

**10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini terdiri 1 kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan serta pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pplh kabupaten/kota.

**11. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melakukan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengembangan kapasitas pejabat pengawas, dan melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.

**12. Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota, pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali, penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota, peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota. serta penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota yang dilaksanakan di UPT Persampahan.

**13. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu penyimpanan sementara limbah b3 dengan melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.

Sedangkan Program rutin/penunjang lainnya yang dilaksanakan tahun 2025 ini antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Kegiatan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 kegiatan
3. Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 1 Kegiatan
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Kegiatan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Kegiatan
6. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 kegiatan
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Kegiatan
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Kegiatan

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

## Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	78	81	21.952.100.326	196.689.000	189.020.600	22.501.768.726
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	94.999.200	0	13.460.800	81.538.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	5.000.000			5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	5.000.000		128.900	4.871.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	5.000.000		884.000	4.116.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	5.000.000		654.500	4.345.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	5.000.000			5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	5.000.000			5.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	34.999.900		6.090.600	28.909.300
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	10.000.000		2.444.000	7.556.000
Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20	20	9.999.800		1.526.000	8.473.800

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	9.999.500		1.732.800	8.266.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	Persentase Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	15.957.119.000	0	157.882.700	15.799.236.300
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	105	15.379.100.000			15.379.100.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	12	12	552.440.000		152.740.000	399.700.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	7.230.000			7.230.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	8.366.200		3.092.700	5.273.500
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	1	9.982.800		2.050.000	7.932.800
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya DOKumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	Tersusunnya DOKumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	3.499.700			3.499.700
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	3.499.700			3.499.700
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	100%	100%	149.999.600	0	9.625.800	140.373.800
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	1	20.000.000		3.717.000	16.283.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	40	29.999.600		5.908.800	24.090.800
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	10	100.000.000			100.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiannya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiannya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.137.867.300	136.689.000	5.641.300	1.268.915.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	31.993.500			31.993.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	6.993.500			6.993.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	20.392.500		2.867.500	17.525.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	9.000.000		1.475.000	7.525.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	17.994.000			17.994.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	5	6.494.000		1.298.800	5.195.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	750	1.044.999.800	136.689.000		1.181.688.800

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	827.968.000	0	0	1.169.968.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	103	103	375.140.000			375.140.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87	88	452.828.000			794.828.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100%	100%	3.039.418.526	60.000.000	2.410.000	3.097.008.526
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.190.000		180.000	2.010.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	309.998.526	60.000.000		369.998.526
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.727.230.000		2.230.000	2.725.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	741.229.000	0	0	941.229.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	42.750.000			42.750.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	34	536.560.000			536.560.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	80	66.920.000			66.920.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	94.999.000			294.999.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Yang Terkena Bencana Maupun Terkena Relokasi Program Kabupaten	Persentase Rumah Layak Huni	100%	76,82%	882.566.300	0	536.853.800	345.712.500
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang terdata akibat korban bencana	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100%	100%	210.127.100	0	21.661.100	188.466.000
Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	1	103.741.600		10.563.100	93.178.500
SubKegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	1	106.385.500		11.098.000	95.287.500
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100%	100%	421.616.700	0	421.616.700	0
SubKegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16	0	421.616.700		421.616.700	0

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	100%	25%	250.822.500	0	93.576.000	157.246.500
SubKegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50	50	122.119.000		41.866.000	80.253.000
SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	1	128.703.500		51.710.000	76.993.500
<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>22,83%</b>	<b>76,82%</b>	<b>909.800.600</b>	<b>2.382.005.400</b>	<b>10.985.300</b>	<b>3.480.820.700</b>
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	100	20,86%	909.800.600	2.382.005.400	10.985.300	3.480.820.700

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
SubKegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	24	100	726.325.600	2.382.005.400		3.108.331.000
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh		4		200.000.000		200.000.000
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Menikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Menikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100	100	183.475.000		10.985.300	172.489.700
<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	<b>Persentase PSU Dalam Kondisi Baik</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>33.239.379.100</b>	<b>7.971.968.712</b>	<b>82.951.000</b>	<b>41.128.396.812</b>
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	Persentase PSU Yang Ditangani	100	25%	33.239.379.100	7.971.968.712	82.951.000	41.128.396.812

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
SubKegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	29	39	11.271.254.000	3.344.336.500		14.615.590.500
SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	1	15.000.000		2.797.000	12.203.000
SubKegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	20	20	304.505.000		80.154.000	224.351.000
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	17	20	21.648.620.100	4.627.632.212		26.276.252.312
<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani</b>	<b>Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani</b>	<b>25,23</b>	<b>3%</b>	<b>4.668.997.799</b>	<b>2.859.298.198</b>	<b>297.253.215</b>	<b>7.231.042.782</b>
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	5	4	883.028.000	0	190.027.215	693.000.785

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
SubKegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2	2	156.227.000		8.361.000	147.866.000
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2	2	726.801.000		181.666.215	545.134.785
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Persentase Permukiman Kumuh Kategori Ringan Yang Ditangani	2,4	0,581	3.785.969.799	2.859.298.198	107.226.000	6.538.041.997
SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6	6	303.000.000		107.226.000	195.774.000
SubKegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2	2	3.482.969.799	2.859.298.198		6.342.267.997
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tingkat Pencemaran Air</b>	<b>Persentase Parameter Air Yang Memenuhi Baku Mutu</b>	<b>5,1</b>	<b>55%</b>	<b>1.683.548.300</b>	<b>0</b>	<b>135.742.400</b>	<b>1.547.805.900</b>

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
		Persentase Sumber Air Yang Terjaga		100%				
		Persentase Parameter Udara Yang Memenuhi Baku Mutu		80%				
		Persentase Desa Di Lahan Kritis Yang Terbina		20%				
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara	50,5	100%	1.397.635.300	0	117.049.000	1.280.586.300
	Indeks Kualitas Udara	Jumlah Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Udara	77,1	1				
		Persentase Desa/Kelurahan yang mengikuti komonitas untuk iklim (Proklim)		23,45%				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	40	40	203.710.000		46.130.000	157.580.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	1	333.161.000		70.919.000	262.242.000
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	19	19	122.454.000			122.454.000
Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1	1	328.311.000			328.311.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	40	40	409.999.300			409.999.300
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya	Persentase Sumber Air Yang Dikonservasi	100%	100%	200.659.000	0	12.964.400	187.694.600

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	1	200.659.000		12.964.400	187.694.600
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah Desa di Lahan Kritis Yang Terbina	100%	5	85.254.000	0	5.729.000	79.525.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	1	85.254.000		5.729.000	79.525.000
<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani</b>	<b>Luas Tutupan Lahan Di Luar Kawasan Hutan</b>	<b>100%</b>	<b>24,91</b>	<b>15.860.715.815</b>	<b>1.546.229.000</b>		<b>17.343.014.015</b>
		<b>Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau</b>		<b>17,09</b>				
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	100%	100%	15.860.715.815	1.546.229.000	63.930.800	17.343.014.015

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
		Jumlah Ruang Terbuka Hijau Dan Pohon Tepi Jalan Yang Terdata		4				
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	299.994.215		32.980.000	267.014.215
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15.79	17.09	15.267.789.600	1.546.229.000		16.814.018.600
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	246.118.000		10.590.000	235.528.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	1	46.814.000		20.360.800	26.453.200
<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>195.999.700</b>		<b>63.071.000</b>	<b>132.928.700</b>

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana	100%	100%	195.999.700		63.071.000	132.928.700
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	195.999.700		63.071.000	132.928.700
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH</b>	<b>Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan Yang Sesuai Dengan Perundangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>503.083.500</b>	<b>0</b>	<b>145.423.000</b>	<b>357.660.500</b>
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	Persentase Pelanggaran Pelaku Usaha Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	503.083.500	0	145.423.000	357.660.500

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15	15	150.944.500		59.266.000	91.678.500
Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	6	2	150.000.000		73.000.000	77.000.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	6	3	65.000.000			65.000.000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30	30	137.139.000		13.157.000	123.982.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan	Persentase Pelanggaran Pelaku Usaha Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	153.571.800	0	26.787.100	126.784.700
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan	100%	100%	153.571.800		26.787.100	126.784.700
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10	10	115.419.300		18.679.800	96.739.500
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5	5	28.982.700		5.781.800	23.200.900

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	5	5	9.169.800		2.325.500	6.844.300
<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Masyarakat Adat yang Di Akui</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>162.245.400</b>		<b>42.231.800</b>	<b>120.013.600</b>
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Memiliki Hukum Adat	75%	100%	162.245.400		42.231.800	120.013.600
		Persentase Masyarakat Adat yang Meningkatkan Kapasitasnya		100%				

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	162.245.400		42.231.800	120.013.600
<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan</b>	<b>Persentase Sekolah Yang Mengikuti Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>281.534.400</b>	<b>0</b>	<b>57.591.680</b>	<b>223.942.720</b>
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Yang Terbina	75%	100%	281.534.400	0	57.591.680	223.942.720
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	281.534.400		57.591.680	223.942.720

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase Sampah Yang Dibuang Ke TPA	24,40%	71,44%	25.469.147.936	4.582.705.500	175.551.200	32.534.760.236
		Persentase Sampah Terkurangi		28,56%				
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Desa Yang Memiliki Bank Sampah	24,40%	41,72%	25.469.147.936	4.582.705.500	175.551.200	32.534.760.236
	Persentase Sampah Yang Ditangani		61,75%					
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	65.700	65.700	18.328.453.036	471.405.500		18.799.858.536
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1	100.000.000		5.400.000	2.753.058.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15	16	6.204.694.900	4.111.300.000		10.315.994.900
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4	4	836.000.000		170.151.200	665.848.800
<b>UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah BLUD Intan Hijau</b>								
<b>Prpgram Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b>	<b>Perentase Sampah Yang Dibuang Ke TPA</b>	<b>24,40%</b>	<b>71,44%</b>	<b>5.936.436.500</b>	<b>5.883.464.980</b>	<b>7.640.000</b>	<b>11.812.261.480</b>
		<b>Persentase Sampah Terkurangi</b>		<b>28,56%</b>				

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Terolah di TPA	24,40%	5,00%	5.936.436.500	5.883.464.980	7.640.000	11.812.261.480
	Persentase Sampah Yang Ditangani		61,75%					
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	7	5	1.213.190.000	5.633.464.980		6.846.654.980
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65700	65700	3.973.246.500		7.640.000	3.965.606.500
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1	1	750.000.000	250.000.000		1.000.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	100%	62,86%	199.280.000	6.205.800	72.540.800	132.945.000
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Menghasilkan Limbah B3 Yang Terbina	62%	37,86%	199.280.000	6.205.800	72.540.800	132.945.000
Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1	1	128.660.000		72.540.800	56.119.200
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	1	70.620.000	6.205.800		76.825.800

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk tahun 2025 kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 112.098.407.476,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 139.019.858.371,- anggaran ini sudah termasuk anggaran untuk UPT Persampahan BLUD Intan Hijau. Perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya pengurangan dan penambahan pada beberapa kegiatan berdasarkan Surat Edaran Bupati No. 900.1.1.4/02-03/BPKPAD Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Bupati Banjar No. 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang Perihal Penetapan Pagu Indikatif SKPD RKPDP Perubahan 2025 diantaranya:

Pengurangan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 94.999.200,- mengalami perubahan menjadi Rp. 81.538.400,-. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 15.957.119.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 15.799.236.300,- yang berkurang sebesar Rp. 157.882.700,-. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi pengurangan honorarium PPKOMIT, belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. . Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 149.999.600,- mengalami perubahan menjadi Rp. 140.373.800,-. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat.
4. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 210.127.100,- mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp. 188.466.000,-. Pengurangan tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan efisiensi jasa konsultan dan honorarium narasumber.
5. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 421.616.700,- menjadi Rp.0 dikarenakan tidak adanya SK Bupati tentang tanggap darurat bencana yg dikeluarkan oleh BPBD.
6. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 250.822.500,- mengalami perubahan menjadi Rp. 157.246.500,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi belanja jasa konsultasi, honorarium narasumber, belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan perjalanan dinas.
7. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha memiliki pagu awal sebesar Rp. 883.028.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 693.000.785,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi belanja jasa konsultasi, honorarium narasumber, belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.

8. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.683.548.300,- mengalami perubahan menjadi Rp. 1.547.805.900,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi belanja jasa konsultasi, honorarium narasumber, belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.
9. Program Perencanaan Lingkungan Hidup memiliki pagu awal sebesar Rp. 195.999.700,- mengalami perubahan menjadi Rp. 132.928.700,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi jasa konsultan & honorarium narasumber, alat tulis kantor, makan minum rapat, dan perjalanan dinas.
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 503.083.500,- mengalami perubahan menjadi Rp. 357.660.500,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi jasa konsultan & honorarium narasumber, alat tulis kantor, makan minum rapat, dan perjalanan dinas serta pengurangan belanja bimbingan teknis.
11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup memiliki pagu awal sebesar Rp. 153.571.800,- mengalami perubahan menjadi Rp. 126.784.700,-. Pengurangan anggaran ini dikarenakan adanya efisiensi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat.
12. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 162.245.400,- mengalami perubahan menjadi Rp. 120.130.600,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi jasa konsultansi, honorarium narasumber, alat tulis kantor, makan minum rapat dan penyelenggaraan acara serta perjalanan dinas.
13. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 281.534.400,- mengalami perubahan menjadi Rp. 223.942.720,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi jasa konsultansi, honorarium narasumber, alat tulis kantor, makan minum rapat dan penyelenggaraan acara serta perjalanan dinas.
14. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 199.280.000,- mengalami pengurangan sebesar Rp. 66.335.000,- menjadi Rp. 132.945.000,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi jasa konsultansi, honorarium narasumber, belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan perjalanan dinas.

Penambahan :

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 909.800.600,- mengalami perubahan menjadi Rp. 3.480.820.270,-. Tambahan anggaran ini digunakan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 100 unit.

2. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan. Sub Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 21.648.620.100,- mengalami perubahan menjadi Rp. 26.276.252.312,-. Tambahan anggaran digunakan untuk beban tagihan listrik, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan arsitektur, pemeliharaan jaringan-jaringan listrik lainnya dan pemasangan PJU/PJL di Desa Alimukim, Desa Pingran, Kec. Paramasan, Kec. Tatah Makmur, dan Desa Cintapuri.
3. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 11.271.254.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 14.615.590.500,-. Tambahan anggaran digunakan untuk tambahan lokasi Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebanyak 39 lokasi.
4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha memiliki pagu awal sebesar Rp. 3.785.969.799,- mengalami perubahan menjadi Rp. 6.342.267.997,-. Tambahan anggaran pada sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh digunakan untuk jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan teknis, Pembuatan/peningkatan Drainase di Gg. Wiryo Kelurahan Keraton, perbaikan jl lingkungan di kawasan kumuh jl Mentri Empat Gg Warga Kelurahan Keraton, dan perbaikan jl lingkungan Gg Al Fattah Kel. Keraton.
5. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 15.267.789.600,- mengalami perubahan menjadi Rp. 16.814.018.600,-. Tambahan anggaran digunakan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau seluas 17.09 Ha.
6. Program Pengelolaan Persampahan. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 25.469.147.936,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 32.534.760.236,-. Tambahan anggaran ini digunakan untuk belanja jasa tenaga kebersihan, pemeliharaan alat angkut dan jasa konsultasi perencanaan teknis (rehab TPS3R dan rehab pool armada kebersihan), pemeliharaan bangunan gedung, pembelian mesin pemilah sampah.
7. BLUD – Intan Hijau Program Pengelolaan Persampahan. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 5.936.436.500,- mendapatkan tambahan sebesar Rp. 5.875.824.980,- menjadi Rp. 11.812.261.480,-. Tambahan anggaran tersebut dipergunakan untuk memperbaiki dan menambah sarana prasaran TPA seperti belanja modal gedung bangunan, pembuatan tugu titik kontrol, pembuatan pagar TPA Cahaya Kencana dan biaya jasa konsultasi lingkungan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13396 Tahun 2024 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah Tanpa disertai Denda Administratif Kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Tempat Pemrosesan Akhir Cahaya Kencana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

## BAB V P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan dan evaluasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dalam Perubahan Renja tahun 2025 diharapkan dapat diakomodir perubahan target kinerja serta usulan perubahan anggaran sebagai akibat dari kebutuhan di masyarakat, terutama dalam hal pelayanan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Banjar. Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perubahan 2025 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara umum, meskipun kendala atau hambatan dan tantangan yang cukup berat, namun demikian kami tetap berusaha untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjutnya perlu dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
2. Perlu menambah atau memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang ada secara rutin.
3. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
4. Perlu adanya rasa tanggungjawab semua pihak dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

Martapura, 30 Mei 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Banjar,

  
**AHMAD BAYHAQIE, ST, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19690909 199703 1 013